



RENJA

Rencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku

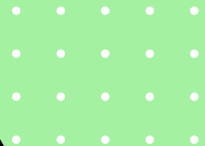
2024



Jl. Pengerinan Pantai Waihaong, Nomor. 1
Ambon



Telepon
(091) 310165



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

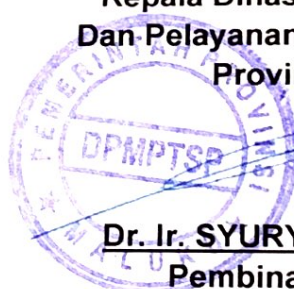
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku ini memuat program-program perencanaan yang dituangkan kedalam bentuk kegiatan-kegiatan. Setiap kegiatan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Maluku serta mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang baik, diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diajukan benar-benar memberikan hasil yang maksimal sehingga terwujudnya pelayanan investasi yang prima dan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Maluku serta tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dengan itikad baik kita bersama dan masukan dari semua pihak akan menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

Ambon, Maret 2023

**Kepala Dinas Penanamn Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku**



Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650204 199103 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN LALU ..	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Provinsi Maluku	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Maluku	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Maluku	14
2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Maluku.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP PROVINSI MALUKU.....	26
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	26
3.2 Program dan kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP PROVINSI MALUKU	45
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kondisi Sarana dan Prasarana DPMPTSP Provinsi Maluku	52
5.2 Rencana Tindak Lanjut	52

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	8
TABEL 2.2 Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP	13
TABEL 2.3 Review Usulan Program dan Kegiatan	19
TABEL 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	25
TABEL 3.1 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas	34
TABEL 3.2 Indikator dan Target Kinerja DPMPTSP	36
TABEL 3.3 Program dan Kegiatan berdasarkan Surat Edaran Gubernur	38
TABEL 3.4 Sasaran Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024	42
TABEL 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	46
TABEL 4.2 Pendanaan Program dan kegiatan Prioritas Prakiraan Maju 2024	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2024, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Pada dasarnya Renja OPD berisi tentang Kebijakan Umum OPD, dan Program/kegiatan Pembangunan di lingkungan OPD baik yang dilaksanakan oleh OPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-OPD merupakan penjabaran dari Renstra-OPD yang disusun oleh setiap OPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja-OPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap

pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Rencana kinerja OPD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka penyusunan Renja OPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Teknokratis (Strategis)**, sesuai dengan fungsinya sebagai menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPDP ke dalam program dan kegiatan OPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPDP secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD.
2. **Demokratis dan Partisipatif**, penyusunan Renja OPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
3. **Politik**, bahwa penyusunan Renja OPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.
4. **Perencanaan Bottom-up**, bahwa penyusunan Renja OPD perlu untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

5. **Perencanaan Top Down**, bahwa proses penyusunan Renja OPD perlu sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RKPD dan RPJMD. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja OPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja OPD dalam penyelenggaraan.

Keluaran utama dari proses penyusunan Renja OPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja OPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-5 tahun kedepan. Dokumen Renja OPD berisikan daftar program/kegiatan dan pagu indikatif OPD serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Renja-OPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
15. Peraturan Daerah Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hasil Forum OPD Tahun 2023 untuk melaksanakan urusan di bidang penanaman modal.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- B. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022, seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan pencapaian target program dan kegiatan di tahun 2022.

Perkiraan capaian tahun berjalan 2022, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP didukung dengan adanya Kesepakatan Forum Koordinasi OPD Tahun 2021. Didalam kesepakatan tersebut termuat beberapa poin yang dalam realisasinya dapat mendukung capaian program dan kegiatan tahun 2022.

Dalam upaya untuk mendukung penyediaan data potensi investasi di Maluku, Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Maluku dalam kesepakatan Forum OPD, memasukkan Perencanaan Potensi Sumber Daya Alam ke dalam Portal Maluku Investasi (Aplikasi).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku juga melakukan promosi dalam upaya meningkatkan Investasi. Bentuk promosi yang dilakukan yaitu dilaksanakannya kegiatan Pameran UMKM Invesda dan Forum Bisnis *One On One Meeting* di Provinsi Maluku yang diharapkan dapat menarik banyak investor untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Adapun Pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal untuk tahun anggaran 2022 disajikan dalam bentuk tabel 2.1 yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	400	2 dokumen	2 dokumen	100
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	11 Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	99%	-	100	100	100	100	100	100
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
#	1	1.03			Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	1 dokumen	-	100	100	100	100	100	100
2	18	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	1 laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat	90 orang	60 Orang	84 orang	84 orang	100	60 Orang	60 Orang	100
2	18	01	1.05	02	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	20 orang	9 orang	9 orang	100	10 Orang	10 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	18	01	1.05	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	40 orang	75 orang	75 orang	100	50 Orang	50 Orang	100
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100	3 Paket	3 Paket	100
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100	4 Paket	4 Paket	100
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100	4 Paket	4 Paket	100
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100	4 Paket	4 Paket	100
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 orang	100 orang	1 laporan	1 laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	10 kali	8 laporan	8 laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	79 unit	88 unit	28 unit	28 unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	6 unit	6 unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	48 unit	49 unit	1 paket	1 paket	100	-	-	-
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	30 unit	5 unit	5 unit	100	-	-	-
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	17 unit	17 unit	100	-	-	-
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran tugas-tugas perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	1 laporan	0 laporan	0	-	-	-
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 Laporan	100
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan										
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan	9 unit	7 unit	7 unit	100	5 Unit	5 Unit	100					
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	34 unit	12 unit	12 unit	100	21 Unit	21 Unit	100					
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100					
2	18	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	12 unit	12 unit	100	20 unit	20 unit	100					
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen peluang investasi PMDN dan PMA	2 dokumen	Rp. 3.134 T	2 dokumen	3 Dokumen	150	2 dokumen	2 dokumen	100					
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku Usaha Kecil Menengah	100%	60%	100%	100%	100	100%	100%	100					
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100					
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	-	44 Kegiatan Usaha	44 Kegiatan Usaha	100	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	100					
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah	4 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150	2 dokumen	2 dokumen	100					
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	3 dokumen	-	1 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100					
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100					
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Promosi Penanaman Modal	45 Pelaku Usaha	132 investor	250 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	14	3 Dokumen	3 Dokumen	100					
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 dokumen	1 event	2 dokumen	3 Dokumen	150	2 dokumen	2 dokumen	100					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan										
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi/publikasi promosi investasi	5 produk digital dan 500 eksemplar	400 leaflet, booklet, majalah 2 edisi	1 produk digital dan 1905 eksemplar	1 produk digital dan 1905 eksemplar	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100					
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 dokumen	1 event	2 Dokumen	3 Dokumen	150	2 Dokumen	2 Dokumen	150					
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan	93	90,5	92	90,75	98,64	92,5	92,5	100					
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	600 izin	1.379 izin	600 izin	1.300 izin	216,67	360 Izin	360 Izin	100					
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi	600 izin	1.379 Izin	600 Pelaku Usaha	1300 Pelaku Usaha	216,67	360 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	100					
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya rapat koordinasi pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan antara pelaku usaha dengan tim teknis	2 kali	4 Kab/Kota	2 Laporan	4 Laporan	200	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	100					
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	Nilai 93	Nilai 90,5	429 Orang	429 Orang	100	1.250 Orang	1.250 Orang	100					
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah urusan pelayanan perizinan	1 kali	-	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-					
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	50 pelaku usaha	3,134 Triliun	317 Pelaku Usaha/Perusahaan	181 Pelaku Usaha/Perusahaan	57,10	284 Pelaku Usaha/Perusahaan/Kegiatan Usaha	284 Pelaku Usaha/Perusahaan/Kegiatan Usaha	100					
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan	100%	50%	100%	50%	50	100%	100%	100					
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal	11 Kab/Kota	9 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100	-	-	-					
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 pelaku usaha	325 Orang	272 Pelaku Usaha	136 Pelaku Usaha	50	272 Pelaku Usaha	272 Pelaku Usaha	100					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modal	11 Kab/Kota	14 Perusahaan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	100	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Investasi	100%	4 paket	100%	50,76%	50,76	100%	100,00%	100
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi investasi secara elektronik	100%	4 paket	100	100	100	100	100	100
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	12 Bulan	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	s

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Analisis Kinerja DPMPTSP Provinsi Maluku dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Provinsi Maluku kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	0	0	2	2	0	0	3	2	2	
2			Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	0	0	250	250	17	22	35	250	250	
3			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90	91	92	92,5	92	90,5	90,75	92	92,5	
4			Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	0	0	50	50	44	349	193	50	50	
5			Persentase pertumbuhan investasi	0	0	100%	100%	617%	104,50%	50,76%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era otonomi daerah isu krusial yaitu pembagian sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, salah satunya adalah dibidang pelayanan publik. Pelimpahan wewenang dan desentralisasi pada sektor publik menempatkan pemerintah daerah ke dalam pusat reformasi organisasi dan manajemen, tapi meskipun era reformasi telah memunculkan perubahan yang mendasar pada model pemerintah dan telah disempurnakan ternyata tak cukup terimplementasikan secara baik bahkan menyisakan berbagai masalah.

Dalam proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih banyak masyarakat umum, dunia usaha beranggapan bahwa untuk mengurus izin usaha masih berbelit-belit, belum transparan, memakan waktu yang cukup lama, biaya mahal, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja khususnya di bidang pelayanan perizinan secara efisien dan efektif.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang permasalahan tersebut diatas diantaranya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam pengurusan penerbitan perizinan dan non perizinan, kemudahan melakukan perizinan secara elektronik serta peningkatan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan perizinan potensi investasi di Provinsi Maluku baik secara non elektronik melalui penyebaran leaflet, booklet dan majalah maupun secara elektronik melalui email, website dan media sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Maluku diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini yang menghambat proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam pengembangan pelayanan tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Terjadi penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat khususnya pelaku usaha sebagai pengguna layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Penurunan nilai IKM disebabkan oleh kurang puasnya masyarakat (pelaku usaha) terhadap besaran nilai retribusi yang telah direvisi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu, yang pemberlakuannya baru berjalan pada pertengahan Tahun 2021.
2. Terjadi penurunan nilai realisasi investasi yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global perang dunia Ukraina-Rusia sehingga mengakibatkan minat investasi oleh para penanam modal potensial jadi menurun. Selain itu juga karena terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai pada daerah potensial untuk berinvestasi.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka diperlukannya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Melaksanakan promosi investasi secara *massive* dengan cara menyelenggarakan forum bisnis dan pameran serta publikasi berbasis digital melalui *youtube*, *website* dan media sosial lainnya.
- b. Menyusun dan mengesahkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan atau/Pemberian Kemudahan Investasi
- c. Memudahkan proses pemberian izin, dengan cara :
 - Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang merupakan gabungan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) dan Rencana Zonasi Wilayah Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);

- Menyediakan layanan aplikasi untuk proses perizinan;
- Menyediakan dan memaksimalkan fungsi ruang klinik konsultasi investasi (*Online Single Submission-RiskBased Approach* (OSS-RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal); dan
- Melakukan pelayanan perizinan dengan “mobil pelayanan keliling” (jemput bola pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan).

d. Terkait tingginya biaya retribusi, diharapkan perhatian Pemerintah Daerah dalam penentuan nilai retribusi dalam kebijakan Peraturan Daerah agar melibatkan pihak-pihak atau unsur terkait seperti : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Bapenda); Biro Hukum dan HAM Setda Maluku; Ditjen Pajak; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (BPKAD); Masyarakat (Pelaku usaha) dan Perwakilan organisasi swasta (Asosiasi).

e. Terkait menurunnya nilai realisasi investasi pada Tahun 2022, maka diharapkan perhatian Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan yaitu Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada pelaku usaha serta menyiapkan data dan peluang investasi yang siap ditawarkan kepada para investor baru serta menjadikan Maluku sebagai surga bagi para investor melalui promosi digital dan non digital.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang termuat diatas, tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur terutama di *Misi ke-5*: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata. Pencapaian nilai realisasi investasi pada dasarnya telah mencapai target yang ditentukan, namun jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya terjadi penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan investasi yang menurun, dikarenakan nilai realisasi investasi berdasarkan data pada aplikasi LKPM disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan (*threats*) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam pengembangan pelayanan tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan penginputan LKPM online.
2. Masih kurangnya regulasi terkait kemudahan berinvestasi.
3. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dengan OPD teknis.

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2023 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut :

1. Kesederhanaan :
Harus mudah dipahami dan dilaksanakan
2. Kejelasan dan Kepastian :
Jelas dan kepastian hak dan kewajiban petugas penanaman modal
3. Keamanan :
Proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman (kepastian hukum)
4. Keterbukaan :
Informasi tentang proses hak dan kewajiban disampaikan secara terbuka kepada penanam modal baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisien :
Tidak ada duplikasi persyaratan oleh beberapa unit pelayanan.
6. Ekonomis :
Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan nilai pelayanan.
7. Ketepatan waktu :
Disesuaikan dengan standar pelayanan yang tertuang dalam aturan.

Selain peluang yang termuat diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku melalui Forum Koordinasi OPD Tahun 2023

2.5 Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

Penyusunan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan

hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, dengan arahan Gubernur Maluku terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Review Usulan Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal da PTSP Provinsi Maluku

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.452.262.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				298.999.420	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				750.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				233.999.570	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	1 dokumen		150.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Maluku	1 dokumen		216.299.570	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Maluku Tengah	4 Kabupaten/Kota		600.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Buru Selatan	5 kegiatan usaha		17.700.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				702.262.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				64.999.850	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	11 Kabupaten/Kota	4 Laporan		152.262.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	1 dokumen		34.999.900	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	11 Kabupaten/Kota	1 dokumen		550.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Kabupaten Buru, Kota Tual, Provinsi Maluku	1 dokumen		29.999.950	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.805.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				608.840.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1.805.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				608.840.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	5 produk digital dan 500 eksemplar		305.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	1 dokumen		292.620.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Luar Negeri, Jakarta, Provinsi Maluku, Jawa	6 event		1.500.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	2 dokumen		316.220.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.065.260.651	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				234.999.500	
	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1.065.260.651	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				234.999.500	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Maluku	2 kali		362.998.651	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Kab/Kota, Provinsi Maluku	360 pelaku usaha		99.999.750	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	11 Kab/Kota, Provinsi Maluku	2 kali		152.262.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Maluku	4 Kegiatan usaha		109.999.800	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11 Kab/Kota, Provinsi Maluku	92,5		330.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Maluku	1.250 orang		24.999.950	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Maluku	1 kali		220.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				893.464.297	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				887.999.257	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				893.464.297	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				887.999.257	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab/Kota, Provinsi Maluku	11 Kabupaten /kota		183.520.440	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab/Kota, Provinsi Maluku	50 pelaku usaha/per usahaan		450.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kab/Kota, Provinsi Maluku	272 pelaku usaha		584.998.950	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab/Kota, Provinsi Maluku	11 Kabupaten /kota		259.943.857	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	11 Kab/Kota, Provinsi Maluku	12 kegiatan usaha		303.000.307	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				165.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				35.000.000	
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				165.000.000	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				35.000.000	
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Maluku	7 laporan		165.000.000	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Maluku	7 dokumen		35.000.000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.945.202.294	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.368.686.205	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.094.152.194	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				367.967.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Langgur	60 orang		573.745.356	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buru	2 dokumen		227.038.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		52.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Maluku	2 Dokumen		2.999.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Maluku	2 dokumen		2.999.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Maluku	1 Dokumen		50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Maluku	3 laporan		7.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota, Jakarta	11 Kabupaten/kota		403.406.838	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota, Jakarta	5 Laporan		127.929.050	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.423.952.283	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.443.685.565	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	12 bulan		3.978.972.283	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	39 orang		4.346.524.365	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Maluku	12 bulan		64.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Maluku	2000 dokumen		47.160.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		370.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Maluku	1 laporan		40.001.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Maluku	4 dokumen		10.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Maluku	18 laporan		10.000.200	
	Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.030.000	Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.467.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		10.780.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		2.000.500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen		8.250.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	2 laporan		5.466.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				311.288.704	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.944.050	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	10 orang		146.288.704	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	10 org		20.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Provinsi Maluku	45 orang		165.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Provinsi Maluku	50 org		40.944.050	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				660.612.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah				711.762.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	12 bulan		11.994.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	3 paket		9.972.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Maluku	12 bulan		12.134.320	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Maluku	4 paket		15.855.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	12 bulan		89.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	4 paket		100.999.400	
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Provinsi Maluku	12 bulan		33.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Provinsi Maluku	4 paket		48.842.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	150 orang		318.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	4 laporan		257.560.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Provinsi Lain	11 kali		196.483.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Provinsi Lain	20 laporan		278.534.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				910.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	3 unit		660.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	1 unit		32.000.000	
	Pengadaan Mebel	-	-		-	Pengadaan Mebel	-	-		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Maluku	20 unit		150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	8 unit		100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.267.024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				532.553.040	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	12 bulan		76.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	1 laporan		76.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	12 bulan		98.067.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	12 laporan		456.353.040	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				351.899.219	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				212.306.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	12 bulan		300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Maluku	5 unit		177.380.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Provinsi Maluku	12 bulan		13.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Provinsi Maluku	21 unit		14.930.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	12 bulan		20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	1 unit		9.996.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	12 bulan		18.699.219	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	20 unit		10.000.000	

Pada rancangan berdasarkan analisis kebutuhan, dalam realisasinya terdapat perubahan lokasi kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Perubahan lokasi ini berkaitan dengan program/kegiatan prioritas yang menjadi tugas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah kegiatan Pameran UMKM Invesda dan Forum Bisnis *One On One Meeting* di Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan ini berdampak terhadap perubahan anggaran dalam jumlah yang besar dan berpengaruh terhadap pagu indikatif yang telah disediakan untuk OPD.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga melanjutkan pemeliharaan dan pengembangan Gerai UMKM di Bandara Internasional Pattimura, untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Maluku yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Adanya berbagai kebutuhan untuk realisasi program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, maka perlu meninjau berbagai program dan kegiatan yang sedianya dapat mendukung untuk peningkatan investasi. Karena akan berpengaruh terhadap besaran pagu indikatif OPD saat rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan dengan hasil analisis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

Sesuai tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja adalah dengan melaksanakan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menerima masukan dari

masyarakat dalam hal ini pelaku usaha dan survey kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mengusulkan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Provinsi Maluku	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan	92,5	
1.1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	360 Izin	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Maluku	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	1.250 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan.

Tujuan dilaksanakannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan realisasi investasi penanaman modal melalui promosi potensi dan peluang investasi daerah.

b. Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah izin dan investor.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
3. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan bidang perizinan dan penanaman modal.

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2024 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2024 antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Gubernur Maluku. Fokus pencapaian tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi Gubernur

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Fokus pencapaian tahun 2024 sesuai dengan Standar Pelayanan minimal (SPM) adalah :
 - Penciptaan pelayanan penanaman modal yang prima;
3. Pencapaian pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Fokus pencapaian tahun 2024 adalah :
 - Penyusunan pedoman pelayanan publik
 - Terlengkapinya fasilitas perizinan yang memadai
4. Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Fokus pencapaian tahun 2024 adalah :
 - Peningkatan realisasi investasi
 - Peningkatan mutu pelayanan perijinan dan non perijinan.

Rencana program/kegiatan yang merupakan perwujudan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pagu indikatif program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.574.930.705,- yang diperuntukkan untuk membiayai 6 Program, 14 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku adalah sebagai berikut dan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 dalam BAB IV Rencana Kerja ini.

A. Pendukung Administrasi SKPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terdiri dari 8 kegiatan, pagu indikatif Rp 7.769.086.701,- dengan rincian kegiatan yaitu :
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 1.232.814.194,-
Terdiri dari 5 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, lokasi sub kegiatan di Jakarta dengan pagu indikatif Rp 659.807.159,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 12.650.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 12.650.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 83.789.171,-;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dan Jakarta dengan pagu indikatif Rp 463.917.864,-.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 4.090.989.783,-.

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 3.978.972.283,-;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan Pagu indikatif Rp 83.808.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Jakarta dengan pagu indikatif Rp 15.812.500,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 12.397.000,-.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 21.884.500,-.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 12.397.000,-;
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 9.487.500,-.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 324.775.759,-.

Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, lokasi sub kegiatan di Jakarta dengan Pagu indikatif Rp 168.232.010,-;
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan Pagu indikatif Rp 156.543.749,-.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 484.079.780,-.

Terdiri dari 6 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan Pagu indikatif Rp 20.872.402,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan Pagu indikatif Rp 6.325.000,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan Pagu indikatif Rp 86.490.351,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 37.950.000,-;
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 124.885.886,-;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Jakarta dengan pagu indikatif Rp 207.556.140,-.

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu indikatif Rp 1.133.339.470,-.

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 759.000.000,-;
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 75.339.470,-;
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 199.000.000,-;
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 100.000.000,-.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu indikatif Rp 247.519.113,-.

Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 113.546.400,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 133.972.713,-.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu indikatif Rp 233.684.102,-.

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 177.000.000,-;

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 15.180.000,-;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 20.000.000,-;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 21.504.102,-.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif Rp 1.629.851.300,-.

1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 822.250.000,-.

Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 695.750.000,-;
- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 126.500.000,-.

1.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, pagu indikatif Rp 807.601.300,-.

Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Jakarta dengan pagu indikatif Rp 175.101.300,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 632.500.000,-.

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 6.856.300.000,-.

Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 1.163.800.000,-;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 5.692.500.000,-.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 1.225.049.749,-.

Terdiri dari 3 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 417.448.449,-;
- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 175.101.300,-;

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 379.500.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 253.000.000,-.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 904.892.955,-.

Terdiri dari 3 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 211.048.506,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 394.909.013,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatif Rp 298.935.436,-.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 189.750.000,-.

Terdiri dari 1 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, lokasi sub kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan pagu indikatifnya Rp 189.750.000,-.

3.2.1 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka terdapat Program dan Kegiatan Prioritas sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera pada BAB IV Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 3.1 berikut ini.

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

3.2.2 Penyelarasan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dengan Usulan Program dan Kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota

Dalam Penyelarasan Program dan Kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku melaksanakan Forum Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Maluku yang menghasilkan beberapa rekomendasi/kesepakatan yang nantinya akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan sesuai urusan Penanaman Modal. Kesepakatan Forum Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se-Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota menentukan satu kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk dijadikan sebagai daerah penembangan investasi;
2. Pemerintah Kabupaten dan Kota menyediakan potensi investasi dan selanjutnya diseleksi oleh Pemerintah Provinsi dalam pembuatan video promosi;
3. Pemerintah Provinsi Maluku menyurati Bupati dan Walikota untuk percepatan pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan target untuk mengeluarkan 1.000 NIB bagi Pelaku UMKM;
5. Skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Koordinasi Supervisi Pencegakan (Korsupgah) KPK – (Perizinan) DPM PTSP Kabupaten dan Kota harus diatas 80;
6. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (KEMENPAN-RB) minimal kategori C;
7. Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan kerjasama dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan kepada Tim Teknis secara *Online*;
8. Ruangan *Front Office* dijadikan ruangan ruang konsultasi dan ruang pengaduan sebagai bentuk inovasi dari DPM PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku;
9. Pemerintah Kabupaten dan Kota menyiapkan Stok Proyek Potensi untuk realisasi investasi;

10. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota harus mencapai target realisasi investasi Tahun 2023 dengan total Rp. 2.02 Triliun.

3.2.3 Indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Indikator kinerja pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Jumlah Dokumen Peluang Investasi PMDN dan PMA
2. Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)
3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi
5. Persentase Pertumbuhan Investasi

Indikator dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku 2020-2024 pada tabel 3.2 berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi			Target	
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	Jumlah	0	0	3	2	4
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	Jumlah	17	22	35	45	45
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	92	90,5	90,75	92,5	93
4	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah	44	349	193	272	50
5	Persentase pertumbuhan investasi	%	617	104,5	50,76	100	100

3.2.4 Mensinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku telah melaksanakan Forum Koordinasi Tahun 2023 di Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 8-9 Maret 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan DPM PTSP Provinsi Maluku dan DPM PTSP Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun 2024 dalam urusan penanaman modal dan perizinan sesuai kewenangannya.

3.2.5 Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sesuai surat edaran Gubernur

Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku mengalokasikan pagu anggaran berdasarkan program dan kegiatan prioritas dan menyesuaikan dengan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sesuai surat edaran Gubernur. Program dan kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan berdasarkan Surat Edaran Gubernur

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Dengan Satuan:Baik)</i>	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	4.808.785.021	<i>Baik</i>	7.173.362.511	<i>Baik</i>	10.044.201.494	<i>Baik</i>	7.324.799.668	<i>Baik</i>	7.754.951.656	<i>Baik</i>	37.106.100.349
	<i>Persentase Layanan OPD (Dengan Satuan:Persen)</i>	<i>90,30%</i>	<i>90%</i>		<i>90%</i>		<i>90%</i>		<i>90%</i>		<i>90%</i>		<i>90%</i>	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53.874.600		803.051.522		974.556.675		1.072.012.343		1.232.814.194		4.136.309.334
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	53.874.600	1	474.169.715	1	521.586.687	2	573.745.356	1	659.807.159	2	2.283.183.517
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.650.000	1	33.650.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.650.000	1	33.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	-	-	1	60.214.999	1	66.236.499	1	72.860.149	1	83.789.171	1	283.100.818
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	-	-	11	268.666.808	11	366.733.489	11	403.406.838	11	463.917.864	11	1.502.724.999
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.715.630.071		4.062.780.283		4.085.180.283		4.087.310.283		4.090.989.783		20.041.890.703
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	3.631.822.071	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	3.978.972.283	12	19.547.711.203
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	83.808.000	12	419.040.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	-	-	-	-	1	12.500.000	1	13.750.000	1	15.812.500	1	42.062.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	1	-	-	-	-	18	9.900.000	18	10.780.000	18	12.397.000	18	33.077.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		-		17.300.000		19.030.000		21.884.500		58.214.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-	-	-	-	1	9.800.000	1	10.780.000	1	12.397.000	1	32.977.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	-	-	-	-	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.487.500	1	25.237.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.932.400		233.399.754		256.739.730		282.413.703		324.775.759		1.273.261.346
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dengan Satuan:orang)	2	9	120.000.000	9	120.899.755	10	132.989.731	10	146.288.704	10	168.232.010	10	688.410.200

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp
			target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:orang)	70	10	55.932.400	75	112.499.999	75	123.749.999	80	136.124.999	80	156.543.749	80	584.851.146
Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.631.350		388.064.474		382.671.763		420.938.939		484.079.780		1.872.386.306
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	1.000.000	12	14.999.930	12	16.499.923	12	18.149.915	12	20.872.402	12	71.522.170
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kebersihan kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	11.999.350	12	11.999.350	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.325.000	12	40.823.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	20.332.000	12	62.156.199	12	68.371.819	12	75.209.001	12	86.490.351	12	312.559.370
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	6.400.000	12	59.999.885	12	30.000.000	12	33.000.000	12	37.950.000	12	167.349.885
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi (Dengan Satuan:orang)	100	100	4.000.000	100	89.749.110	150	98.724.021	150	108.596.423	180	124.885.886	180	425.955.440
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Dengan Satuan:Laporan)	10	12	152.900.000	10	149.160.000	11	164.076.000	11	180.483.600	12	207.556.140	12	854.175.740
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				308.723.500		1.008.406.560		974.339.470		1.034.339.470		1.133.339.470		4.459.148.470
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	20.000.000	2	468.540.000	3	600.000.000	3	660.000.000	3	759.000.000	12	2.507.540.000
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	-	-		49	75.339.470	48	75.339.470	48	75.339.470	48	75.339.470	193	301.357.880
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	-	9	288.723.500	30	394.863.840	20	199.000.000	20	199.000.000	20	199.000.000	99	1.280.587.340
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	-		8	69.663.250	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	369.663.250
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.166.000		197.877.348		203.667.283		224.034.011		257.639.113		991.383.755
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2.000.000	12	19.998.000	12	8.000.000	12	8.800.000	12	10.120.000	12	48.918.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	78.046.000	12	81.600.000	12	89.760.000	12	98.736.000	12	113.546.400	12	461.688.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	28.120.000	12	96.279.348	12	105.907.283	12	116.498.011	12	133.972.713	12	480.777.355
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.827.100		479.782.570		3.149.746.290		184.720.919		209.429.057		4.273.505.936
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	60.173.200	12	109.770.000	12	120.747.000	12	132.821.700	12	152.744.955	12	576.256.855

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp
			target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	14.200.000	12	24.926.000	12	12.000.000	12	13.200.000	12	15.180.000	12	79.506.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	160.000.000	12	-	12	3.000.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	3.200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	15.453.900	12	345.086.570	12	16.999.290	12	18.699.219	12	21.504.102	12	417.743.081
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Jumlah)	1	1	305.236.800	1	242.924.088	2	1.288.420.000	2	1.417.262.000	2	1.629.851.300	2	4.883.694.188
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				69.952.500		103.849.307		650.000.000		715.000.000		822.250.000		2.361.051.807
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terfasilitasinya UMK dengan perusahaan besar (Dengan Satuan:Perusahaan Besar)	-	-	69.952.500	-	103.849.307	2	550.000.000	2	605.000.000	2	695.750.000	2	2.024.551.807
	Jumlah UMK yang naik kelas (Dengan Satuan:UMK)	-	25		-		5		5		5		-	
	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal (Dengan Satuan:Dokumen)	-			3		1		1		1		-	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Fasilitas UMKM dengan perusahaan besar (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)						3	100.000.000	4	110.000.000	4	126.500.000	4	336.500.000
	Evaluasi Fasilitas UMK yang naik kelas dan evaluasi keberlanjutan kemitraan (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)						4		4		3		3	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				235.284.300		139.074.781		638.420.000		702.262.000		807.601.300		2.522.642.381
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	-		-	-	4	138.420.000	4	152.262.000	3	175.101.300	11	465.783.300
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	235.284.300	3	139.074.781	1	500.000.000	1	550.000.000	1	632.500.000	1	2.056.859.081
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA) (Dengan Satuan:Jumlah)	10	10	206.647.000	10	1.499.998.692	45	5.420.000.000	45	5.962.000.000	45	6.856.300.000	45	19.944.945.692
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				206.647.000		1.499.998.692		5.420.000.000		5.962.000.000		6.856.300.000		19.944.945.692
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya informasi/publikasi promosi investasi (Dengan satuan:digital dan non digital)	1 paket	50 booklet, 50 leaflet, 100 tas promosi	25.000.000	200 leaflet, 200 booklet, majalah 2 edisi	224.998.750	5 produk digital dan 500 eksemplar	920.000.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	1.012.000.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	1.163.800.000	5 produk digital dan 500 eksemplar	3.345.798.750
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	181.647.000	2	1.274.999.942	2	4.500.000.000	2	4.950.000.000	2	5.692.500.000	2	16.599.146.942

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp
			target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	91	90	272.975.000	91	487.498.719	92	968.418.774	92,5	1.065.260.651	93	1.225.049.749	93	4.019.202.893
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				272.975.000		487.498.719		968.418.774		1.065.260.651		1.225.049.749		4.019.202.893
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi (Dengan Satuan:Izin)	600	600	232.800.000	670	299.998.885	1.000	329.998.774	600	362.998.651	600	417.448.449	600	1.643.244.759
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya rapat koordinasi pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan antara pelaku usaha dengan tim teknis (Dengan Satuan:kali)	-	-	-	-	74.999.961	2	138.420.000	2	152.262.000	2	175.101.300	2	540.783.261
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya survei indeks kepuasan masyarakat (pelaku usaha) (Dengan Satuan:Nilai)	90	90	40.175.000	91	112.499.873	92	300.000.000	92,5	330.000.000	93	379.500.000	93	1.162.174.873
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah urusan pelayanan perizinan (Dengan Satuan:kali)	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	253.000.000	1	673.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Jumlah)	50	50	14.289.500	50	650.300.363	50	715.330.399	50	786.863.439	50	904.892.955	50	3.071.676.656
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				14.289.500		650.300.363		715.330.399		786.863.439		904.892.955		3.071.676.656
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan proyek/perusahaan di 11 Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	2	2	14.289.500	10	151.669.785	11	166.836.764	11	183.520.440	11	211.048.506	11	727.364.995
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan proyek/perusahaan melalui Bimtek/Sosialisasi (Dengan Satuan:Pelaku usaha/perusahaan)	15	15	-	50	283.800.944	50	312.181.038	50	343.399.142	50	394.909.013	50	1.334.290.137
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan proyek/perusahaan di 11 Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	10	10	-	10	214.829.634	11	236.312.597	11	259.943.857	11	298.935.436	11	1.010.021.524
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	82.300.000	100	137.019.400	100	150.000.000	100	165.000.000	100	189.750.000	100	724.069.400
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				82.300.000		137.019.400		150.000.000		165.000.000		189.750.000		724.069.400
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)	-	12	82.300.000	12	137.019.400	7	150.000.000	7	165.000.000	7	189.750.000	7	724.069.400
TOTAL :				5.690.233.321		10.191.103.773		18.586.370.667		16.721.185.758		18.560.795.659		69.749.689.178

3.2.6 Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu

Sasaran merupakan elaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan, berikut penjabaran sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2024 yang ingin dicapai yaitu meningkatnya investasi pembangunan daerah.

Sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang baik	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	Rp 7.769.086.701
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.232.814.194
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Rp 4.090.989.783
	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Rp 21.884.500
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya ASN yang memiliki sertifikat	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat	Rp 324.775.759
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah	Rp 484.079.780
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	Rp 1.133.339.470
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya tugas-tugas perkantoran	Kelancaran tugas-tugas perkantoran	Rp 247.519.113
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Rp 233.684.102

2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersedianya dokumen peluang investasi PMDN dan PMA	Jumlah dokumen peluang investasi PMDN dan PMA	Rp 1.629.851.300
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif - dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku Usaha Kecil Menengah	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku Usaha Kecil Menengah	Rp 822.250.000
	Kegiatan Pembuatan - Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah	Jumlah dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah	Rp 807.601.300
3	Program Promosi Penanaman Modal	Tersedianya dokumen Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Promosi Penanaman Modal	Rp 6.856.300.000
	Kegiatan Penyelenggaraan - Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Tersedianya dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Rp 6.856.300.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan	Rp 1.225.049.749
	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tercapainya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Rp 1.225.049.749
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Rp 904.892.955
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan - Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Rp 904.892.955
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tercapainya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	Rp 189.750.000
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya data dan informasi investasi secara elektronik	Persentase data dan informasi investasi secara elektronik	Rp 189.750.000

3.2.7 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

Sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Maluku yaitu melaksanakan urusan Pelayanan Publik (Perizinan) dan urusan Penanaman Modal (Investasi), maka Forum Koordinasi DPM PTSP Provinsi Maluku Tahun 2023 mengusung Tema “Pelayanan Perizinan Berkualitas bagi Pelaku Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Maluku”. Hal ini disesuaikan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan 2024, khususnya Prioritas Pembangunan Nomor 3 yaitu Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata, serta Prioritas Pembangunan Nomor 7 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 selanjutnya disajikan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Serta Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.1
Rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2	18	Penanaman Modal							
2	18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.629.851.300				1.792.836.430
2	18	02 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			822.250.000				904.475.000
2	18	02 1.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Maluku	1 dokumen	695.750.000	APBD	1 dokumen	765.325.000
2	18	02 1.01 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	5 Kegiatan Usaha	126.500.000	APBD	5 Kegiatan Usaha	139.150.000
2	18	02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				807.601.300			888.361.430
2	18	02 1.02 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Maluku, Jakarta	1 Dokumen	175.101.300	APBD	1 Dokumen	192.611.430
2	18	02 1.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	1 dokumen	632.500.000	APBD	1 dokumen	695.750.000
2	18	03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				6.856.300.000			6.856.300.000
2	18	03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				6.856.300.000			6.856.300.000
2	18	03 1.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Provinsi Maluku	1 Dokumen, 1.000 Eksemplar	1.163.800.000	APBD	1 Dokumen, 1.000 Eksemplar	1.163.800.000
2	18	03 1.01 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku, Jakarta	2 Dokumen	5.692.500.000	APBD	2 Dokumen	5.692.500.000

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	18	04									
					1.225.049.749				1.284.304.724		
2	18	04	1.02						1.284.304.724		
					1.225.049.749				1.284.304.724		
2	18	04	1.02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	11 Kab/Kota, Provinsi Maluku, Jakarta	400 Pelaku Usaha	417.448.449	APBD	400 Pelaku Usaha	459.193.294
2	18	04	1.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	4 Kegiatan Usaha	175.101.300	APBD	5 Kegiatan Usaha	192.611.430
2	18	04	1.02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	500 Orang	379.500.000	APBD	500 Orang	379.500.000
2	18	04	1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Maluku	4 Kegiatan Usaha	253.000.000	APBD	5 Kegiatan Usaha	253.000.000
2	18	05									
								904.892.955			904.892.955
2	18	05	1.01								
					904.892.955						904.892.955
2	18	05	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	8 Kegiatan Usaha	211.048.506	APBD	8 Kegiatan Usaha	211.048.506
2	18	05	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312 Pelaku Usaha	272 Pelaku Usaha	394.909.013	APBD	272 Pelaku Usaha	394.909.013

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	18	05	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	9 Kab/Kota, Provinsi Maluku	12 Kegiatan Usaha	298.935.436	APBD		12 Kegiatan Usaha	298.935.436
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								208.725.000
2	18	06	1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				189.750.000				208.725.000
2	18	06	1.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku	7 Dokumen	189.750.000	APBD		7 Dokumen	208.725.000
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.769.086.701				8.370.800.989
2	18	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.232.814.194				1.235.344.194
2	18	01	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	4 Dokumen	659.807.159	APBD		2 Dokumen	659.807.159
2	18	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Maluku	2 Dokumen	12.650.000	APBD		2 Dokumen	13.915.000
2	18	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi Maluku	2 Dokumen	12.650.000	APBD		2 Dokumen	13.915.000
2	18	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Maluku	3 Laporan	83.789.171	APBD		3 Laporan	83.789.171
2	18	01	1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota, Jakarta	1 Laporan	463.917.864	APBD		1 Laporan	463.917.864
2	18	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.090.989.783				4.500.088.761

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	40 Orang/Bulan	3.978.972.283	APBD		40 Orang/Bulan	4.376.869.511
2	18	01	1.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Maluku	2.000 Dokumen	83.808.000	APBD		2.000 Dokumen	92.188.800
2	18	01	1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Maluku, Jakarta	1 Laporan	15.812.500	APBD		1 Laporan	17.393.750
2	18	01	1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Maluku	18 Laporan	12.397.000	APBD		18 Laporan	13.636.700
2	18	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.884.500				24.072.950
2	18	01	1.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	1 dokumen	12.397.000	APBD		1 dokumen	13.636.700
2	18	01	1.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	2 Laporan	9.487.500	APBD		2 Laporan	10.436.250
2	18	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				324.775.759				341.598.960
2	18	01	1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	10 orang	168.232.010	APBD		11 orang	185.055.211
2	18	01	1.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Maluku	50 orang	156.543.749	APBD		50 orang	156.543.749
2	18	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				484.079.780				532.487.758
2	18	01	1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Maluku	3 Paket	20.872.402	APBD		3 Paket	22.959.642
2	18	01	1.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Maluku	4 Paket	6.325.000	APBD		4 Paket	6.957.500
2	18	01	1.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Maluku	4 Paket	86.490.351	APBD		4 Paket	95.139.386
2	18	01	1.06	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Maluku	4 Paket	37.950.000	APBD		4 Paket	41.745.000
2	18	01	1.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	4 Laporan	124.885.886	APBD		4 Laporan	137.374.475

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	18	01	1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Provinsi Lain	18 Laporan	207.556.140	APBD		18 Laporan	228.311.754
2	18	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.133.339.470				1.219.239.470
2	18	01	1.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Maluku	2 Unit	759.000.000	APBD		3 Unit	834.900.000
2	18	01	1.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Provinsi Maluku	1 Paket	75.339.470	APBD		1 Paket	75.339.470
2	18	01	1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Maluku	8 Unit	199.000.000	APBD		8 Unit	199.000.000
2	18	01	1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Maluku	5 Unit	100.000.000	APBD		5 Unit	110.000.000
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				247.519.113				260.916.384
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-		-	-
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Maluku	1 Laporan	113.546.400	APBD		1 Laporan	113.546.400
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Maluku	12 Laporan	133.972.713	APBD		12 Laporan	147.369.984
2	18	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				233.684.102				257.052.512
2	18	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Maluku	5 Unit	177.000.000	APBD		5 Unit	194.700.000
2	18	01	1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Maluku	23 Unit	15.180.000	APBD		24 Unit	16.698.000
2	18	01	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Maluku	1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	22.000.000
2	18	01	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Maluku	23 Unit	21.504.102	APBD		25 Unit	23.654.512
TOTAL								18.574.930.705				19.417.860.098

Tabel 4.2
Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas prakiraan maju tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN TAHUN 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		5.692.500.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		5.692.500.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5.692.500.000
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		796.948.449
	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		796.948.449
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	417.448.449
	TOTAL		8.005.542.898

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kondisi Sarana Prasarana DPMPTSP Provinsi Maluku

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dikategorikan dinas daerah provinsi tipe "A" yang mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pelayanan publik khususnya terkait perizinan dan non perizinan DPM PTSP Provinsi Maluku selayaknya memiliki bangunan gedung yang representatif sesuai tugas dan fungsinya. Namun hingga saat ini DPMPTSP Provinsi Maluku masih menempati bekas gedung Taman Hiburan Rakyat/Taman Ria yang kondisinya belum memadai sesuai kebutuhan pelayanan perkantoran. Hal ini membuktikan bahwa DPMPTSP Provinsi Maluku belum memiliki gedung kantor yang layak sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan diatas, maka DPMPTSP Provinsi Maluku mengusulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik diperlukan sarana gedung kantor yang memadai dan representatif untuk proses pelaksanaan perizinan secara terintegrasi sesuai Standar Pelayanan Prima;
2. Selain sarana gedung kantor, juga termasuk didalamnya kebutuhan kendaraan dinas operasional dalam rangka melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta kajian potensi investasi baik yang ada di kota Ambon maupun Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku;

3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamankan proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara online menggunakan *Online Single Submission – Risk By Approach* (OSS-RBA) dan pelaksanaan evaluasi pengawasan penanaman modal secara online menggunakan aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) maka DPM PTSP Provinsi Maluku masih membutuhkan tambahan sumber daya aparatur yang handal dan kompeten dalam rangka kelancaran tugas perkantoran.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan capaian kinerja kedepannya.